

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi Dengan Judul:

FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA ANGKA PERDAGANGAN MANUSIA DI
INDIA-BANGLADESH

Muslihah Dwi Yartini

20140510302

Yang Disetujui



Drs. Husni Amrivanto P., M.Si.

Dosen Pembimbing

FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA ANGKA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDIA-BANGLADESH

Muslihah Dwi Yartini

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: muslihah.dwi.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Human trafficking is one of the world's most profitable criminal, besides drug and arms trafficking. Trafficking in South Asian countries has increased, although the number of rescued victims has also increased. India became a center of human trafficking and transit point for cross-border trade. While Bangladesh became one of the largest supplier country of human trafficking in India. India and Bangladesh expected to cooperate in preventing on human trafficking issues by 2015. Despite the work and more casualties being detected and rescued, the number of trafficking increases. This journal contains an explanation of the factors that make human trafficking increase in India-Bangladesh .

Keywords: *Human Trafficking, Human Security, Economic Security, Personal Security, India, Bangladesh.*

Pendahuluan

Perdagangan manusia terjadi semenjak adanya pembagian kelas-kelas dalam masyarakat. Perdagangan manusia terjadi di seluruh dunia, dimana UNODC mendeteksi terdapat hampir 500 rute di dunia di taun 2012-2014. Di Eropa, korban yang terdeteksi berasal dari 137 warga negara yang berbeda. Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. 85 persen koban yang diperdagangkan di Asia Selatan ditujukan untuk kerja paksa dan 15 persen lainnya sebagai eksploitasi seks.

India dan Bangladesh adalah negara yang termasuk ke dalam sepuluh negara dengan penduduk terbanyak di dunia (US Census Bureau, 2017). Banyaknya jumlah penduduk di India dan Bangladesh menyebabkan kasus anak hilang, penculikan, hingga perdagangan perempuan dan anak sangat marak terjadi. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, terjadi kenaikan persentasi hingga 4 persen atas perdagangan anak di India. Pada tahun 2016, terjadi kenaikan sebesar 27 persen korban perdagangan anak dan 22 persen korban perdagangan perempuan dari tahun sebelumnya. Lebih dari 80.000 anak menghilang di India setiap tahunnya dan sekitar 34.000 diantaranya tidak ditemukan. Sedangkan setiap bulannya di Bangladesh sekitar 400 perempuan dan anak menjadi korban perdagangan lintas negara. Bangladesh menjadi pemasok perdagangan anak terbesar di India. Lebih dari 400 anak-anak yang berasal dari Bangladesh berjuang untuk keluar dari India pada setiap bulannya.

Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia terjadi semenjak adanya pembagian kelas-kelas dalam masyarakat. Perdagangan manusia kemudian menjadi masalah yang mulai mendapat perhatian dunia setelah pada tahun 1904 diadakan sebuah Konvensi Internasional untuk Penekanan terhadap Perdagangan Budak Berkulit Putih (*International Convention for the Suppression of the "White Slave Traffic"*). Meskipun konvensi ini hanya mengacu pada perempuan-perempuan Eropa yang bekerja diluar negeri yang kemudian mengalami penipuan dan pemaksaan kerja, namun konvensi ini merupakan langkah awal dunia internasional melawan adanya perdagangan manusia. Setelah Perang Dunia pertama berakhir dan terbentuk Liga Bangsa-Bangsa, diadakan sebuah konvensi lanjutan dengan mengubah rujukan perbudakan kulit putih menjadi perdagangan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan dengan melihat kenyataan bahwa sebagian besar korban atas perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak.

Perdagangan manusia sendiri didefinisikan sebagai kegiatan pencarian, penjualan, pembelian, penampungan, penerimaan, pendistribusian manusia dengan menggunakan kekerasan berupa ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan ketidaktahuan atau penerimaan bayaran atau imbalan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki wewenang atas korban dengan tujuan eksploitasi terhadap korban (UNODC, Topics: Human Trafficking, 2014).

Perdagangan manusia terjadi umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi. Keadaan ekonomi yang buruk membuat banyak orang memilih untuk melakukan migrasi guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini kemudian dilihat sebagai kesempatan bagi sebagian kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan para calon imigran. Dengan penipuan janji kehidupan yang lebih layak membuat kebanyakan orang tua rela melepaskan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Sebagian besar calon imigran yang terjebak dalam perdagangan adalah perempuan dan anak dibawah umur yang berpendidikan rendah, tidak memiliki keahlian dasar atau pengetahuan tentang segala prosedur untuk bekerja di luar negeri. Calon imigran diseludupkan, ditampung dan didistribusikan secara ilegal, dipaksa untuk menjadi buruh dengan upah rendah dan jam kerja yang melebihi batas, bahkan menjadi pekerja seks komersial.

Selain itu, Budi Winarno dalam bukunya *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (2014) menyebutkan bahwa lemahnya peran dan kontrol pemerintah juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia. Terdapat banyak badan kerja sama pencari tenaga kerja palsu yang menawarkan jasa penyaluran tenaga kerja ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, buruh, pekerja hotel, industri, dengan merujuk nama tempat yang tidak diketahui korban (Winarno, 2014, hal. 341). Badan penyalur tenaga kerja seharusnya telah mengantongi izin dari pemerintah terkait penyaluran tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Tenaga kerja yang tidak terdaftar oleh pemerintah akan sulit untuk dilacak keberadaan tempat kerjanya serta tidak mendapat perlindungan oleh negara yang seharusnya diperoleh tenaga kerja tersebut.

Untuk kasus perdagangan manusia lintas negara, meskipun tidak selalu, namun sering ditemukan bahwa korban adalah orang-orang yang berasal dari kelompok imigran gelap atau pengungsi. Kedua kelompok ini rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Keadaan perang dan bencana alam membuat sebagian orang mengambil keputusan untuk bermigrasi. Misalnya pada kasus meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia yang berasal dari Suriah semenjak konflik negara tersebut berlangsung. Korban bencana alam dan perang yang tidak memiliki tujuan tempat tinggal sementara atau terpisah dari keluarga berpeluang besar untuk menjadi korban perdagangan manusia.

Manusia diperdagangkan dengan berbagai tujuan, antara lain eksploitasi seksual, pernikahan secara paksa, kerja paksa, mengemis secara paksa, penjualan anak, tentara anak-anak, pernikahan anak dan penjualan organ. Interpol menggolongkan perdagangan manusia ke dalam 4

kategori sebagai berikut. Pertama, perdagangan pada perempuan untuk eksploitasi seksual. Kedua, perdagangan manusia untuk kerja paksa. Ketiga, eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dalam industri pariwisata. Keempat, penjualan organ manusia (Interpol, 2014).

Data UNODC pada tahun 2014 menunjukkan lebih dari 85 persen perdagangan manusia di 71 negara di dunia bertujuan untuk eksploitasi kerja buruh paksa (UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, 2016, hal. 25). Dalam hal lain, kelompok bersenjata merekrut anak-anak korban perang, terutama laki-laki, untuk dijadikan tentara yang ikut berperang di wilayah seperti Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah. Sedangkan penjualan organ terjadi sebagian besar di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Asia Selatan menyumbang 2 persen angka perdagangan manusia lintas negara dengan rute jarak menengah dan jauh. Dari tahun 2012 hingga 2014 korban yang berasal dari Asia Selatan sendiri ditemukan di 35 negara di dunia terutama kawasan Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur Tengah. Lebih dari 85 persen perdagangan manusia di Asia Selatan terjadi di dalam negeri akibat dari kesenjangan sosial-ekonomi dalam negeri yang tinggi, populasi yang besar dan arus migrasi yang kuat. 8 persen lainnya korban ditemukan di negara-negara tetangga di kawasan Asia Selatan, seperti dari Nepal dan Bangladesh menuju India. Sebagian besar sisanya diperdagangkan ke Timur Tengah dan Eropa, serta Amerika Selatan dan beberapa negara bagian Amerika Serikat.

India menjadi salah satu negara yang menjadi tempat transit, tempat tujuan ataupun berasalnya perdagangan manusia. Lebih dari 80% perdagangan manusia di India terjadi di dalam negeri. Perdagangan manusia di India tidak hanya terjadi antar wilayah di dalam negeri saja, melainkan telah menjadi “komoditas” luar negeri. Sebagian besar orang yang terjerumus kedalamnya diakibatkan penipuan kerja. Angka ini terus bertambah tiap tahunnya. Di tahun 2013, *National Crime Records Bureau* atau Biro Catatan Kejahatan Nasional India mencatat sebanyak 3.940 kasus yang dilaporkan atas perdagangan manusia, meningkat 10,4 persen dari laporan di tahun 2012 (NCRB, 2013).

Di akhir tahun 2016 NCRB India memberikan laporan terkait seluruh kejahatan yang terjadi di India. Dari hasil laporan tersebut didapatkan data kejahatan terhadap wanita dengan tujuan perdagangan manusia terjadi sebanyak 694 kasus dengan jumlah total korban sebanyak 1.310 orang. Sementara kejahatan terhadap anak-anak dengan tujuan pernikahan paksa (sesuai dengan IPC seksi 366) terjadi kepada 17.672 korban dan sebanyak 155 korban ditujukan untuk prostitusi (NCRB, Ministry of Home Affairs, 2016, hal. 189-213). Total penculikan anak yang

terjadi di seluruh India pada tahun 2016 adalah sebanyak 67.409 korban usia 0-18 tahun, lebih dari 50.000 korban adalah anak perempuan. Sekitar 18.000 anak perempuan dipaksa untuk menikah, sedangkan 86 korban anak perempuan lainnya diperdagangkan dengan tujuan prostitusi. Sementara lebih dari 100 korban anak laki-laki dan perempuan diculik dengan tujuan dijual, menjadi pengemis dan budak (NCRB, Ministry of Home Affairs, 2016, hal. 110-126). Kasus yang sama juga terjadi pada orang dewasa rentang umur 18 hingga 60 tahun. Perempuan menjadi korban terbanyak dengan jumlah 26.683 di wilayah negara bagian India. Sementara itu, di 19 kota besar di India dengan jumlah penduduk lebih dari juta jiwa, ditemukan 2.549 korban penculikan terhadap orang dewasa, 1.597 diantaranya adalah perempuan (NCRB, Ministry of Home Affairs, 2016, hal. 122-126).

Sedangkan perdagangan manusia Bangladesh terus meningkat tiap tahunnya. Angka perdagangan manusia dari Bangladesh menuju India mencapai 50.000 di tahun 2016. Perdagangan ini umumnya ditujukan untuk menjadi pekerja seks komersial dan kerja paksa. Sebagian besar korban adalah perempuan dengan rentang usia 11-18 tahun dan anak laki-laki dibawah 10 tahun. Anak laki-laki yang diperdagangkan ke wilayah Timur Tengah biasanya dipekerjakan sebagai joki balap unta dan buruh konstruksi bangunan, dengan upah rendah dan jam kerja berlebih. Tidak jarang yang berakhir dengan kematian. Terdapat 18 titik transit perdagangan manusia di sepanjang perbatasan India-Bangladesh. Daerah perbatasan Khulna, Jessore, Satkhira, Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Mymensingh, Comilla, Brahmanbaria, dan Sylhet sering digunakan sebagai rute darat untuk perdagangan. Di wilayah utara, perdagangan manusia terjadi di distrik Kurigram, Lalmonirhat, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon, Dinajpur, Naogaon, Chapai Nawabganj dan Rajshahi di selatan (Amin, 2011). Wilayah Bangladesh Utara menjadi tempat yang paling rentan terjadinya perdagangan manusia. Perdagangan manusia dari Bangladesh ke Timur Tengah biasanya melalui jalur Dhaka-Mumbai-Karachi-Dubai.

Perdagangan manusia di Bangladesh tidak hanya dipasok dari penduduk Bangladesh saja, melainkan juga dari pengungsi Rohingya. Di tahun 2017, tercatat lebih dari 68.000 pengungsi Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dan UNHCR mendeteksi lebih dari 800.000 pengungsi berada di Bangladesh hingga saat ini. Pada tenda-tenda pengungsi di perbatasan wilayah Bangladesh Selatan-Burma, anak-anak hidup terpisah dari orang tuanya. Perempuan muda dan anak-anak menjadi objek rentan untuk diperdagangkan. Umumnya pelaku

perdagangan menjanjikan pekerjaan atau pernikahan kepada gadis-gadis muda usia 13-18 tahun. Pengungsi memiliki keadaan dimana mereka tidak mempunyai pekerjaan, tempat tinggal dan uang. Tawaran itu berupa kehidupan yang lebih baik dan pekerjaan, dengan menjanjikan kepada para orang tua bahwa hidup anak-anak mereka akan lebih baik di kota-kota di India. Setelah menerima tawaran pelaku, korban akan diseludupkan ke India untuk menjadi pekerja seks, melakukan pernikahan paksa dan kerja paksa. Sebagian besar identitas mereka ditahan dan diganti dengan identitas India palsu agar mereka tidak dapat melarikan diri.

Kerjasama India dan Bangladesh Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia

Hubungan bilateral India-Bangladesh telah terjalin sejak lama dan menjadi lebih baik serta memiliki jangkauan yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. India adalah negara pertama yang mengakui Bangladesh sebagai negara merdeka pada Desember tahun 1971. Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan bahwa banyak hal yang membuat India dan Bangladesh seperti tidak dapat dipisahkan. Selain karena letak geografis kedua negara yang saling berbatasan, faktor warisan budaya, sejarah, tradisi, bahasa, bahkan musik, tarian dan segala bentuk seni menjadikan kedua negara memiliki hubungan yang erat. Berbagai konflik seperti sengketa batas wilayah, konflik sumber air dan imigran gelap telah mendewasakan kedua negara. Diluar berbagai konflik yang terjadi, India dan Bangladesh sadar akan saling hubungan yang saling membutuhkan. Meskipun sempat mengalami berbagai konflik, namun India dan Bangladesh semakin memperluas jangkauan kerjasama bilateral antar kedua negara.

Di tahun 2015, berbagai penandatanganan dilakukan oleh India dan Bangladesh yang menyangkut kerjasama bilateral. Kerjasama tersebut meliputi protokol penukaran instrumen perjanjian batas tanah, perjanjian antar pemerintah, protokol atau program antar pemerintah, MoU antar pemerintah dan adopsi pernyataan antar pemerintah. Jumlah total terdapat 22 perjanjian, MoU atau dokumen lainnya ini selama periode Juni 2015 antara India dan Bangladesh (Ministry of External Affairs, Government of India, 2015).

Salah satu MoU yang ditandatangani tersebut adalah MoU antara Pemerintah India dan Pemerintah Bangladesh Dalam Kerjasama Bilateral Pencegahan Perdagangan Manusia. MoU tersebut ditandatangani kedua negara pada 6 Juni 2017 di Bangladesh. Dalam laporan Kementerian Luar Negeri India tersebut tertera bahwa lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama memperkuat pencegahan seluruh bentuk perdagangan manusia, terutama yang terjadi kepada perempuan dan

anak-anak; melakukan penyelamatan, pemulihan, memastikan investigasi dan penuntutan hukuman terhadap pelaku dan sindikat kejahatan terorganisir di salah satu negara dengan cepat, serta melakukan repatriasi korban sesegera mungkin. Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah melakukan reintegrasi terhadap korban yang akan dilakukan oleh negara asal secara efektif dan aman (Ministry of External Affairs, Government of India, 2015).

Di dalam MoU bagian III pasal 3-5 tentang pencegahan perdagangan manusia. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa India dan Bangladesh melakukan pencegahan perdagangan manusia di masing-masing negara dengan meningkatkan pengawasan dan kontrol di daerah perbatasan guna mendeteksi tindakan kejahatan tersebut, meningkatkan pendidikan, kesadaran hidup, keterampilan dasar bekerja, dan memberikan referensi kepada masyarakat mengenai perdagangan manusia. Sedangkan pasal 5, *The Anti-trafficking Cells and Task Forces* akan melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi pemerintah terkait program peningkatan kesadaran dan pembentukan mekanisme masyarakat, berbagi data dan informasi melalui *focal point* yang ditunjuk dari Kementerian Dalam Negeri masing-masing negara, melakukan patroli terkoordinasi secara bersamaan oleh pasukan penjaga perbatasan India dan Bangladesh, mengaktifkan titik nodal, pertemuan rutin komando lapangan serta melakukan pemeriksaan kegiatan perekrutan tenaga kerja dan agen perjalanannya melalui pihak yang berwenang.

Perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak-anak terdapat pada bagian IV dari MoU dari pasal 6 hingga 10. Di pasal 8 disebutkan pemerintah dapat bekerja sama dengan NGO bila memang diperlukan dalam memberikan tempat penampungan, perawatan, akses hukum dan bantuan lain yang diperlukan korban. Sedangkan bagian V berisi repatriasi pada pasal 11. Proses pemulangan korban ke negara asalnya ini harus berjalan dengan cepat dan bila terjadi penundaan lebih dari 6 bulan, maka dapat dibawa ke otoritas yang lebih tinggi.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri India, *The Immoral Traffic (Prevention) Act* tahun 1956 adalah undang-undang utama pencegahan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seks komersial di India (Ministry of External Affairs, Government of India, 2018). Sementara itu, dalam *Indian Penal Code (IPC)* telah mengatur berbagai peraturan, hukuman dan perlindungan terkait perdagangan manusia. KUHP ini dibuat berdasarkan standar protokol PBB. *IPC section 370-374* mengatur sanksi terhadap perdagangan manusia dalam bentuk, cara dan tujuan apapun, baik untuk eksploitasi termasuk gadis dibawah umur untuk seks komersial, jual-

beli prostitusi, perbudakan dan kerja paksa. Hukum Pidana (amandemen) 2013 telah memberlakukan 370 dan 370A IPC.

Pada Konstitusi India pasal 23 ayat 1 berisi larangan kegiatan perdagangan manusia, pemaksaan mengemis dan segala macam bentuk kerja paksa. Disebutkan pula di pasal 24 Konstitusi India larangan bagi anak usia dibawah 14 tahun untuk bekerja di pabrik atau pertambangan atau pekerjaan berbahaya lainnya. Selain itu pada Konstitusi India pasal 15, terdapat larangan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Pada pasal 16 (1) dituliskan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama berkaitan dengan pekerjaan atau pengangkatan ke kantor manapun di bawah negara.

Undang-undang lain yang berlaku adalah *Protection of Children from Sexual offences* (POCSO) *Act* tahun 2012. Undang-undang ini merupakan hukum khusus yang untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi seksual dan lebih terperinci. Undang-undang lainnya yaitu UU Larangan Pernikahan Anak tahun 2006, UU Sistem Buruh Kontrak (abolisi) tahun 1976 dan UU Pekerja Anak (Larangan & Peraturan) tahun 1986. Tidak hanya undang-undang, upaya India juga dapat dilihat melalui tindakan meratifikasi *United Nations Convention on Transnational Organised Crime* (UNTOC) dan Konvensi SAARC dalam Mencegah dan Memerangi Perdagangan Prostitusi Perempuan dan Anak (Ministry of External Affairs, Government of India, 2018).

Di tahun 1976, Kementerian Pembangunan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial India mendirikan *Bureau of Manpower, Employment and Training* untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam dan ekspor luar negeri, terlibat dalam perencanaan dan implementasi pemanfaatan sumber tenaga kerja di India. Biro ini memiliki berbagai *training center* di kota-kota di India. Didirikannya biro ini menjadi salah satu upaya membangun tenaga kerja ekspor yang berkualitas, setidaknya memiliki keterampilan dasar, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Penjagaan keamanan di wilayah perbatasan oleh Borders Security Force (BSF) India. Patroli teratur, pengecekan identitas, keamanan yang ketat telah dilakukan. Selain itu BSF juga bekerja sama dengan UNODC dan NGO setempat dalam membantu penyelamatan korban di perbatasan, memberikan tempat penampungan sementara sebelum dipulangkan ke negara asalnya. Terdapat rumah rehabilitasi korban di Bihar. Di tahun 2012 BSF mengikuti workshop

yang diselenggarakan UNODC guna memperbaiki proses identifikasi korban dan penanganan dan pengobatan yang tepat bagi korban.

Selain itu pemerintah India memberikan biaya sekolah gratis dari kelas 1 SD hingga kelas 2 SMP. Diharapkan dengan pendidikan gratis ini dapat setidaknya meringankan biaya untuk anak-anak agar dapat bersekolah. Beberapa NGO maupun INGO melakukan campaign dan sosialisasi kejahatan perdagangan manusia kepada masyarakat melalui media konvensional, secara langsung, elektronik, cetak dan sebagainya. Pemanfaatan media sosial juga digunakan dalam memberikan edukasi mengenai masalah tersebut.

Seperti halnya India, pemerintah Bangladesh mengatur undang-undang terkait perdagangan manusia di negaranya. Dalam *Banglades Penal Code*, penculikan, pemaksaan, perbudakan dan kerja paksa diatur pada *section 359-374*. Pada *section 370* dan *371* mengatur mengenai perbudakan, sedangkan *372* dan *373* berisi penjualan dan pembelian anak dibawah umur dengan tujuan prostitusi, dan *374* mengatur tentang kerja paksa. Selanjutnya di *section 464* mengatur tentang pembuatan dokumen palsu dan penyalahgunaannya.

Dalam Konstitusi Bangladesh telah diatur dalam pasal 20 (2) bahwa negara harus memastikan tidak adanya rasa tidak menyenangkan akibat pembayaran gaji yang tertunda. Pasal 27 berisikan tentang seluruh warga negara sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pasal 29 (1) mengatakan bahwa seluruh warga berhak atas kesempatan kerja yang sama, sementara pada 29 (2) dikatakan tidak ada diskriminasi atau tidak diterima yang berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin dan tempat tinggal. Pasal 31 berisi hak untuk mendapat perlindungan hukum. Pasal 32 berisi hak untuk hidup dan kebebasan pribadi, serta di pasal 34 berisi larangan kerja paksa.

Pada *Suppression of Immortal Traffic Act* tahun 1933, *section 4* mengatur hukuman terkait rumah bordil. Sedangkan *section 7-12* mengatur tentang pelacuran, hukuman bagi yang mengambil keuntungan dari prostitusi, hukuman bagi yang mehanan anak dibawah umur dengan tujuan prostitusi dan sebagainya. Undang-undang lainnya yaitu pada *Repression of Violence Against Women and Children Act* pasal 5 dan 6, UU Tenaga Kerja Bangladesh tahun 2006, UU Anak tahun 1974, UU Ekstradisi tahun 1974, UU *Human Trafficking Deterrence And Suppression* tahun 2012 dan UU Migrasi dan Tenaga Kerja Luar Negeri tahun 2013.

Selain itu, penjagaan perbatasan oleh *Border Guards Bangladesh* (BDB) juga semakin dipeketat. Meski masih banyak penyeludupan imigran di Bangladesh, namun usaha pemerintah

dibantu oleh NGO membuahkan hasil. Polisi Bangladesh telah melakukan penyelamatan ratusan orang imigran gelap dengan tujuan Malaysia di Teluk Bengal. UN Migration Agency (IOM) telah melakukan penyelamatan terhadap pengungsi Rohingya yang diketahui menjadi korban perdagangan di Cox's Bazar. BGB juga melakukan pertemuan pada November 2017, untuk mendesak Myanmar untuk merepatriasi pengungsi Rohingya yang berada pada *camp-camp* di perbatasan Bangladesh-Burma.

Pemerintah Bangladesh dan beberapa NGO telah mengusahakan untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua atas bahaya pernikahan anak. Meski belum terlaksana, Perdana Menteri Hasina berjanji untuk menghentikan pernikahan dibawah usia 15 pada tahun 2021 mendatang dan pernikahan anak dibawah usia 18 pada tahun 2041. Tidak hanya India, pemerintah Bangladesh juga memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Bangladesh. Pemerintah Bangladesh juga membuka lahan pekerjaan bagi perempuan. Meskipun pada sektor yang rendah dan upa yang rendah pula. Namun usaha ini menjadi salah satu upaya meningkatkan angka partisipasi pekerja perempuan dan membantu perkembangan ekonomi Bangladesh.

Peningkatan Angka Perdagangan Manusia Di India-Bangladesh

India dan Bangladesh telah membuat beberapa undang-undang terkait perdagangan manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta pelarangan atas diskriminasi. India dan Bangladesh juga telah melakukan upaya di dalam masing-masing negara guna dalam mengatasi perdagangan manusia. India dan Bangladesh juga telah mengadakan kerja sama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Namun angka perdagangan manusia di kedua negara justru meningkat. Dengan menggunakan konsep Human Security, penulis mencoba menjawab faktor penyebab peningkatan angka perdagangan manusia di kedua negara.

Human Development Report (HDR), yang merupakan bagian dari UNDP menyoroti 2 hal utama dari konsep keamanan manusia. Yang pertama adalah kebebasan dari rasa takut. Yang kedua adalah kebebasan dari berkeinginan. Kemudian UNDP-HDR secara lebih spesifik membagi keamanan manusia ke dalam tujuh bagian. Pertama, keamanan ekonomi, untuk memastikan setiap orang mendapatkan penghasilan minimum yang diperlukan. Contoh ancamannya adalah kemiskinan yang terjadi tanpa ada perkembangan atau perbaikan dan ketidaksesediaan lapangan kerja. Kedua, ketahanan pangan, sebagai jaminan akses (fisik maupun ekonomi) terhadap bahan makanan. Contoh masalah dari ketahanan pangan adalah dengan

sulitnya mendapatkan air bersih, terjadi kelaparan dan gizi buruk. Ketiga, jaminan kesehatan, yaitu jaminan perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya jaminan setiap wilayah mendapatkan akses terhadap kesehatan dengan peralatan dan tenaga kerja yang mencukupi. Contoh ancaman dari jaminan kesehatan adalah adanya penyakit menular yang tidak segera diatasi, gizi buruk, air dan makanan yang tercemar, dan sebagainya.

Keempat, keamanan lingkungan alam, melindungi setiap manusia dari kerusakan alam jangka pendek dan panjang, ancaman alam yang dibuat manusia itu sendiri dan kemunduran dari lingkungan alam. Contohnya adalah sumber daya alam yang mulai menipis, terjadi polusi ekstrim dan bencana alam. Kelima, keamanan pribadi, melindungi manusia dari ancaman-ancaman terhadap diri manusia. Misalnya ancaman manusia dari kejahatan baik fisik maupun berupa sebuah ancaman lisan, kerja paksa, pelecehan terhadap anak dan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Keenam, keamanan masyarakat, melindungi masyarakat dari kehilangan nilai-nilai dan hubungan yang bersifat tradisional dan dari kekerasan dan ketidaktoleransian etnis. Contoh ancamannya adalah terjadi konflik antar etnis dan atau antar agama. Ketujuh, keamanan politik, untuk memastikan bahwa setiap orang hidup di lingkungan yang menghargai dan menghormati hak asasi setiap manusia. Misalnya setiap orang memiliki hak berpendapat, adanya rasa aman dan terhindar dari penindasan politik tertentu. (Gomez & Gasper, 2013).

Dari tujuh spesifikasi yang dipaparkan oleh HDR, 2 diantara yaitu keamanan ekonomi dan keamanan pribadi yang tidak terpenuhi adalah penyebab meningkatnya perdagangan manusia di kedua negara.

1. Keamanan Ekonomi Penduduk India dan Bangladesh Tidak Terpenuhi

Pertumbuhan ekonomi India berkembang dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB India mencapai angka 8,1 persen. Namun angka ini mengalami penurunan menjadi 7,1 persen di tahun 2016 dan 6,3 persen di tahun 2017 (World Bank, 2017). Pada tahun 2016-2017 FDI yang ada di India mencapai angka tertinggi, yaitu 43,4 miliar US\$. *World Bank* juga memperkirakan akan ada peningkatan investasi swasta di India hingga 8,9 persen di tahun 2018-2019, sehingga mendorong naiknya PDB India pada tahun tersebut (IBEF, 2018). Meski begitu, berbagai permasalahan ekonomi di India masih belum teratasi hingga meningkatkan angka perdagangan manusia.

Yang pertama adalah kemiskinan. Pada tahun 2012, *World Bank* mendapati bahwa 1 dari 5 orang India berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di India

mencapai 270 juta orang, yang berarti sekitar 21,7 persen dari jumlah total penduduk di India saat itu. 80 persen dari penduduk miskin India tinggal di daerah pedesaan di seluruh negara tersebut (World Bank, 2016). Kemiskinan terjadi salah satunya akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Angka kelahiran di India mencapai 20,7 persen di tahun 2012 (UNICEF, 2013). Angka ini turun menjadi 19 persen di tahun 2017. Jumlah penduduk yang berlebih tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah pendapatan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, dapat mengurangi jumlah pendapat per kapita di India.

Permasalahan kedua terkait ekonomi yang India dihadapi adalah ketersediaan lapangan kerja terbatas dan pengangguran. Sedikitnya lapangan kerja juga menjadi salah satu penyebab dari permasalahan kemiskinan. Lebih dari 50 persen sektor yang dijalankan di India adalah sektor pertanian. Penduduk sulit untuk mendapatkan pekerjaan diluar sektor tersebut akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan lain, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kemampuan dasar penduduk India. Untuk tingkat pendidikan, UNESCO mencatat di tahun 2013, sebanyak 2.897.747 anak-anak India putus sekolah, sementara jumlah remaja India yang tidak bersekolah sebanyak 11.109.371 orang (UNICEF, 2013).

Di tahun 2012, tingkat *Worker Population Ratio* (WPR) atau rasio populasi pekerja diperkirakan mencapai 50,8 persen di seluruh India. Perempuan berpartisipasi sebanyak 23,6 persen saja dari total jumlah pekerja (Press Information Bureau, Ministry of Labour & Employment, 2012). Biro Tenaga Kerja India mencatat di tahun 2013, untuk usia 15-29 tahun angka WPR mencapai 34,2 persen. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 39,5 persennya mengalami kerja paksa. Sedangkan sebanyak 13,3 persen pada rentang umur yang sama adalah pengangguran (Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment, 2013).

India dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang kompleks. Partisipasi perempuan yang bekerja menurun di tahun 2015 saat GDP India tengah melambung. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak didukung dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Meskipun pemerintah India telah banyak menumbuhkan lapangan pekerjaan di tahun 2016, namun hal tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan penduduk yang ada. Di tahun 2017, lebih dari 17 juta penduduk India masih belum memiliki pekerjaan (ILO, 2017). Jumlah pertumbuhan ketersediaan pekerjaan diperkirakan menurun di tahun 2018.

Hal serupa terjadi di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh tengah merasakan kestabilan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai pertumbuhan GDP Bangladesh sebesar 7,2 persen di tahun 2016 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 7,1 persen di tahun 2017. Namun, di tahun 2016 World Bank mencatat 1 dari 4 orang Bangladesh hidup dalam kemiskinan, yaitu 24,3 persen dari jumlah total penduduk Bangladesh. Sementara 12,9 persen penduduk Bangladesh lainnya hidup dalam kemiskinan yang ekstrim.

Sementara itu, angka pengangguran di Bangladesh mencapai 4,1 persen di tahun 2016. Hampir 25 persen penduduk Bangladesh yang berusia 15-29 tahun tidak produktif, dimana mereka tidak bersekolah maupun bekerja. Satu per tiga dari jumlah pekerja di Bangladesh hanya bekerja paruh waktu atau sementara. Jumlah pekerja pada masing-masing sektor, baik pertanian, pelayanan jasa maupun industri hampir sama, yaitu di atas 30 persen di tahun 2013. Jumlah tertinggi pekerja berada di sektor pertanian yaitu sebanyak 34,5 persen (ILO, 2016). Namun pelayanan jasa menyumbang hasil terbanyak dari GDP Bangladesh. Penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah Bangladesh maupun perusahaan swasta tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk Bangladesh. Di tahun 2014 dan 2015 pemerintah Bangladesh hanya menghasilkan sekitar 600.000 pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja yang terhitung dari April 2015 hingga Juni 2016 mencapai 62,5 juta (Bangladesh Bureau Statistics, Ministry of Planning, 2017).

Melihat data yang tercantum di atas, membuktikan keamanan ekonomi penduduk India maupun Bangladesh masih jauh dari kata tercukupi. Permasalahan ini menimbulkan keinginan untuk bekerja sama satu sama lain antara India dan Bangladesh. Masing-masing negara telah melakukan usaha perbaikan sistem ekonomi dan masih terus berjalan hingga saat ini.

2. Keamanan Pribadi Penduduk India Dan Bangladesh Tidak Terpenuhi

Lebih dari 70 persen penduduk India beragama Hindu. Hindu sangat kuat ikatannya dengan budaya dan tradisi yang juga merupakan sejarah bagi India. Salah satu kitab umat Hindu, yang juga memuat tentang orang-orang Arya (salah satu penduduk asli India) adalah Kitab Veda. Di dalam Kitab Veda terdapat Manusmriti, yang berarti hukum Manu atau institusi Manu (Manu adalah leluhur atau nenek moyang manusia menurut kepercayaan umat Hindu). Hukum ini digunakan sebagai pedoman dalam hidup, ini seperti hukum dan peraturan

untuk mengatur kehidupan manusia. Jika dalam Islam terdapat syariat, maka seperti itulah Manusmriti tersebut digambarkan dalam ajaran Hindu.

Dalam hukum ini membenarkan adanya kasta-kasta sebagai suatu keteraturan dalam kehidupan manusia. Kasta Hindu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah Brahmana, adalah orang-orang yang mengabdikan diri pada agama, penghubung antara manusia dan dewa, para intelektual, mengetahui adat istiadat dan pengetahuan suci. Yang kedua adalah Ksatria, mereka yang mengatur urusan pemerintahan, memiliki kekuasaan, pejuang, raja, bangsawan. Yang ketiga adalah Waisya, yaitu kelompok pedagang, petani, pengrajin dan pejabat rendah. Dan yang terakhir adalah Sudra, yaitu orang biasa yang mengerjakan pekerjaan kasar atau buruh atau biasa disebut dengan rakyat jelata. Terdapat satu golongan yang bukan bagian dari kasta, yaitu Dalits atau kelompok orang tak tersentuh. Seluruh hukum Kasta ini berlaku dalam kehidupan manusia secara turun temurun di India (Musidi, 2012, hal. 4).

Pada zaman India modern seperti saat ini, kasta dalam masyarakat kota sudah mulai jarang ditemui. Banyaknya arus migrasi dan percampuran budaya membuat orang-orang mulai berpikiran luas, menerima perbedaan dan bersikap lebih adil. Presiden India saat ini, Ram Nath Kovind, merupakan seorang Dalits dan menjadi presiden kedua yang berasal dari kaum Dalits. Meskipun perbedaan kasta mulai hilang, namun tidak bagi daerah pedesaan. Di desa-desa di India, penduduk masih menggunakan sistem kasta dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya seseorang akan sulit untuk mendapat pekerjaan jika ia berasal dari kasta Dalits, meskipun ia adalah seorang sarjana. Begitu pula pelayanan dan perilaku masyarakat terhadap mereka yang berasal dari kasta bawah. Beberapa perempuan dinikahkan dengan kasta di atasnya untuk mengubah garis keturunan dan hidup lebih layak, tapi suami yang merasa berada dari kasta atas akan memperlakukan istri dengan tidak baik, hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga bahkan istri dieksploitasi dan diperdagangkan demi uang.

Selain itu, budaya patriarki di India masih sangat kental, terutama di daerah pedesaan. Pandangan bahwa perempuan dilahirkan untuk mengabdikan kepada keluarga dan perempuan selalu berada pada tingkatan dibawah laki-laki sudah ditanamkan pada setiap individu. Perempuan dianggap tidak mampu menghasilkan uang, bergantung pada laki-laki dan hanya dapat membantu urusan rumah tangga. Sehingga kesempatan bekerja untuk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Pemikiran penduduk desa India yang masih belum

terbuka terkait pendidikan tinggi dan pekerjaan dalam ruang publik bagi perempuan masih sulit untuk diubah. Adat istiadat yang masih dijunjung tinggi penduduk desa menjadikan perempuan tidak termotivasi dari dalam diri untuk mendapatkan setidaknya kemampuan dasar dalam bekerja.

Beberapa kasus anak hilang juga berakhir diperdagangkan. Kebanyakan anak-anak dari pedesaan India memutuskan untuk lari dari lingkungan yang membuat mereka frustrasi (dengan kemiskinan, orang tua pemabuk, kekerasan dalam rumah tangga, tidak bersekolah dan terpaksa bekerja), setelah sampai ke kota dengan tidak berbekal apapun, baik uang maupun tujuan, mereka berakhir dengan tersesat pada kepadatan aktivitas kota yang membingungkan. Hal ini sangat rentan terhadap penculikan anak yang berujung perdagangan manusia.

Sementara itu, Bangladesh adalah negara dengan partisipasi kerja perempuan tertinggi di Asia Selatan. Dalam perkembangannya, tingkat partisipasi kerja dari perempuan Bangladesh telah mengalami peningkatan. Tahun 2017 Bangladesh berada pada posisi 47 dari 147 negara di dunia dalam partisipasi kerja perempuan menurut *World Economy Forum* (WEF). Namun keadaan ini adalah tampak luar dari peningkatan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi Bangladesh. Realitanya, meskipun jumlah perempuan dalam partisipasi kerja meningkat, kebanyakan perempuan mendapatkan upah setengah dari upah pekerja laki-laki. Mayoritas perempuan bekerja pada pekerjaan dengan kebutuhan keterampilan rendah dan upah yang rendah. Sementara tingkat melek huruf perempuan di Bangladesh masih 54 persen.

Kondisi perempuan di Bangladesh sangat memprihatinkan dimana 18 persen anak perempuan menikah dibawah usia 15 tahun di tahun 2016. Orang tua berpikiran bahwa dengan menikahkan anak, hidup mereka akan lebih baik. Anak-anak tidak mendapatkan hak untuk bersekolah dan memilih pilihan hidup mereka, serta mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pada usia tersebut tubuh dan mental anak masih berkembang. Kehamilan justru akan membahayakan kehidupan ibu dan calon bayi.

Pemulihan terhadap korban perdagangan manusia di India dan Bangladesh juga belum mencukupi. Korban yang telah diamankan untuk sementara ditampung sebelum akhirnya dikembalikan ke tempat asalnya. Beberapa organisasi non pemerintah membantu ikut membantu dalam menangani korban. Namun biro sosial setempat yang menangani korban

kurang mendapatkan distribusi dana, sehingga proses evakuasi, pemulihan dan repatriasi tidak berjalan maksimal.

Kurangnya tenaga kerja dan rumah rehabilitasi dari pemerintah masing-masing negara, baik India maupun Bangladesh, menyulitkan untuk menangani pemulihan tersebut. Tidak jarang korban harus menunggu proses hukum hingga lebih dari 6 bulan sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Setelah dipulangkan, banyak dari korban yang justru tidak diterima kembali oleh keluarganya. Pemerintah seharusnya dapat memberikan sosialisasi terhadap korban dan keluarganya agar dapat dimengerti oleh keluarga mengenai martabat korban, serta perekonomian keluarga. Korban yang tidak diberikan pembekalan keterampilan dasar dalam bekerja dan pengetahuan tentang penipuan kerja tidak jarang kembali terjerumus ke dalam perdagangan manusia.

Kesimpulan

Perdagangan manusia dilakukan untuk bermacam-macam tujuan, diantaranya kerja paksa, pernikahan paksa, mengemis paksa, pekerja seks komersial, pernikahan anak, tentara anak dan penjualan organ tubuh. UNODC mendeteksi terdapat hampir 500 rute di dunia di tahun 2012-2014. Data UNODC pada tahun 2014 menunjukkan lebih dari 85 persen perdagangan manusia di 71 negara di dunia bertujuan untuk eksploitasi kerja buruh paksa (UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, 2016, hal. 25). Korban yang paling banyak ditemukan adalah perempuan dengan jumlah total lebih dari 50 persen di seluruh dunia dan anak-anak sebanyak 28 persen.

India menjadi salah satu tujuan utama dan sebagai tempat transit perdagangan manusia dari negara-negara di Asia Selatan. Perdagangan manusia dengan korban penduduk India sendiri, lebih banyak terjadi di dalam negeri. Di tahun 2013, NCRB India mencatat hampir 4.000 kasus perdagangan manusia yang dilaporkan dengan korban terbanyak adalah perempuan yang memiliki rentang usia 12 hingga 18 tahun.

Sementara Bangladesh menjadi negara dengan pemasok perdagangan manusia terbanyak di India. Korban tidak hanya warga negara Bangladesh, tetapi juga berasal dari pengungsi Rohingya. Perdagangan manusia dengan tujuan rute menengah-jauh, seperti Eropa dan Timur Tengah, melalui jalur utama Dhaka-Mumbai-Karaci-Dubai. Kebanyakan korban adalah perempuan dibawah usia 18 tahun dan melakukan pernikahan paksa. Pernikahan anak dibawah

umur 15 tahun di Bangladesh adalah yang tertinggi di Asia. Migrasi melewati batas negara yang dilakukan oleh penduduk Bangladesh sangat besar, sehingga sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Hanya 40 persen dari imigran perempuan yang bermigrasi melalui agen perekrutan resmi di Bangladesh.

Kerjasama antara India dan Bangladesh kemudian dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi perdagangan manusia. Kedua negara telah membuat undang-undang terkait masalah tersebut, memperkenalkan masalah dan hukuman bagi tindakan kejahatan perdagangan manusia kepada masyarakat dan melaksanakan upaya-upaya dalam negeri masing-masing. India dan Bangladesh bekerja sama dalam penjagaan perbatasan, kedua negara juga telah bekerjasama dalam mengevakuasi korban dibantu oleh beberapa organisasi non pemerintah, menampung, memberikan rehabilitasi dan keterampilan dasar, pemulangan korban hingga melakukan itegrasi kembali agar korban dapat diterima di keluarga dan lingkungan asalnya.

Namun terjadi peningkatan angka perdagangan manusia di kedua negara. Berdasarkan konsep *Human Security*, peningkatan tersebut terjadi karena faktor tidak terpenuhinya keamanan ekonomi dan keamanan pribadi di kedua negara tersebut. India dan Bangladesh memiliki permasalahan serupa dalam kemiskinan dan pengangguran. Lapangan pekerjaan yang tidak banyak tersedia, sedangkan pertumbuhan penduduk terus meningkat terjadi pada kedua negara. Disamping itu, perempuan India dan Bangladesh mendapatkan perlakuan tidak adil atas kesempatan dan pilihan pekerjaan akibat budaya patriarki yang masih melekat pada dua negara tersebut. Sehingga angka partisipasi perempuan kerja di kedua negara masih rendah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Interpol, F. (2014). Trafficking in Human Beings. Dalam B. Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer* (hal. 328). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

- Bangladesh Bureau Statistics, Ministry of Planning. (2017). *Quarterly Labour Force Survey (QLFS) 2015-16*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.
- UNODC. (2016). Global Report on Trafficking in Persons 2016. *UNODC-UN GIFT*.

Jurnal Elektronik:

- Amin, M. R. (2011). Trafficking Women and Children in Bangladesh: A Silent Tsunami of Bangladesh. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 2, 206. Retrieved Maret 26, 2018, from <http://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/viewFile/356/244>
- Gomez, O. A., & Gasper, D. (2013). Human Security. *United Nations Development Programme Human Development Report Office*, 2. Retrieved Februari 19, 2018, from http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf
- ILO. (2016). Bangladesh. *Work4Youth*. Retrieved Maret 23, 2018, from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_537748.pdf
- ILO. (2017). World Employment And Social Outlook: Trends 2017. 25. Retrieved Maret 23, 2018, from International Labour Organization: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_541211.pdf
- NCRB, Ministry of Home Affairs. (2016). *Crime in India 2016 Statistics*. Retrieved Maret 21, 2018, from <http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/Crime%20Statistics%20-%202016.pdf>

Website:

- IBEF. (2018, Januari). *Home: Brand India: About Indian Economy Growth Rate & Statistics*. Retrieved Maret 17, 2018, from India Brand Equity Foundation (IBEF) Web site: <https://www.ibef.org/economy/indian-economy-overview>
- Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment. (2013, November 28). *Report on Youth Employment-Unemployment Scenario 2012-13*. Retrieved Maret 19, 2018, from Ministry of Labour & Employment Web site: <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=100894>
- Ministry of External Affairs, Government of India. (2015, Juni 7). *Home: Media Center: Bilateral/Multilateral Documents*. Retrieved Maret 26, 2018, from Ministry of External Affairs Web site: <http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/25344/list+of+agreements+mous+and+other+documents+concluded+during+the+visit+of+prime+minister+to+dhaka+june+06+2015>
- Ministry of External Affairs, Government of India. (2018). *Home: Consular, Passport and Visa Division: Human Trafficking*. Retrieved Maret 26, 2018, from Ministry of External Affairs Web site: <http://www.mea.gov.in/human-trafficking.htm>
- NCRB. (2013). Retrieved Maret 21, 2018, from National Crime Records Bureau Web site: http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2013/Chapters/6A-Human%20Trafficking_NEW.pdf
- Press Information Bureau, Ministry of Labour & Employment. (2012, Agustus 13). *Survey on Employment and Unemployment*. Retrieved Maret 19, 2018, from Ministry of Labour & Employment Web site: <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=86062>
- UNICEF. (2013). *Browse by Country: India: Education and Literacy*. Retrieved Maret 20, 2018, from UNESCO Institute for Statistics Web site: <http://uis.unesco.org/country/IN>
- UNICEF. (2013, Desember). *Statistics: India*. Retrieved Maret 18, 2018, from UNICEF Web site: https://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html
- UNODC. (2014). *Topics: Human Trafficking*. Retrieved Februari 4, 2018, from United Nation Office of Drugs and Crime Web Site: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>
- US Census Bureau. (2017). *Home: U.S. and World Population Clock*. Retrieved Februari 20, 2018, from US Census Bureau Website: <https://www.census.gov/popclock/world>
- World Bank. (2016, Mei 27). *Who We Are: News*. Retrieved Maret 18, 2018, from World Bank Web site: <http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2016/05/27/india-s-poverty-profile>

World Bank. (2017). *Data: India*. Retrieved September 27, 2017, from World Bank Data Web site: <https://data.worldbank.org/country/india>